

**Simpul-Simpul Integrasi di Timika**  
**Iwan Gardono Sujatmiko**  
**(FISIP-UI)**

Integrasi sosial merupakan topik kunci dalam Sosiologi di mana terdapat pertanyaan *why is society possible* seperti yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Secara parsial hal ini telah dijelaskan oleh berbagai ilmuwan sosial klasik. Misalnya Hobbes menyatakan bahwa masyarakat terjadi karena adanya negara sebagai monster (*leviathan*) yang dapat memaksa integrasi (1947:Ch. XVI). Berkaitan dengan terjadinya masyarakat Adam Smith menekankan peran “*moral sentiments*” (1937:234). Ia juga menyatakan bahwa adanya pasar (*market*) membuat orang saling tergantung, sehingga dapat terjadi keteraturan. Pendapat lain dikemukakan oleh Emile Durkheim yang menyatakan adanya solidaritas mekanis dalam masyarakat yang homogen dan solidaritas organik dalam masyarakat heterogen (1933, Ch. II dan III). Durkheim juga menekankan pentingnya *collective consciousness* dalam terjadinya integrasi masyarakat (1948). Analisis integratif yang menekankan pentingnya berbagai institusi dikemukakan oleh Talcott Parson. Menurut Parsons, peran *polity, economy, societal community dan fiduciary system* dalam kerangka AGIL dapat menjelaskan mengapa masyarakat dapat bertahan (1953).

Berbagai teori di atas menyumbang pada pemahaman tentang integrasi masyarakat, namun untuk menganalisis keadaan empirik suatu masyarakat kerangka yang dikemukakan oleh Amitai Etzioni, Percy S.Cohen dan Daniel Bell lebih mempermudah pemahaman kita. Menurut Etzioni (1968:356-357) integrasi terjadi karena faktor koersif (*politics*), utilitarian (*economic*) dan normatif (*persuasion dan values*). faktor koersif yang mencakup peran negara (birokrasi sipil dan militer) mencakup teori dari Hobbes sementara faktor utilitarian atau kepentingan ekonomi teori tercakup dalam teori Smith (pasar). Selain itu faktor normatif dibahas oleh teori Durkheim (*collective consciousness*) dan teori Smith (*moral sentiments*). Selain itu, Etzioni menyatakan bahwa semakin matang suatu masyarakat, maka terdapat trend bahwa tingkat koersi (politik) semakin menurun sedangkan tingkat utilitarian (ekonomi) dan normatif semakin meningkat (1968: 374-375).

Kerangka Amitai Etzioni yang menekankan koersif, utilitarian dan normatif mirip dengan kerangka Percy S.Cohen yang terdiri dari *Coercion, Interest dan Value Concensus* (1968:21-30). Hanya saja Cohen menambahkan faktor keempat yakni *inertia theory of social order*. Menurutnya semakin lama suatu masyarakat terintegrasi, maka akan semakin menghasilkan kekuatan-kekuatan yang semakin memperkokoh integrasi tersebut (1978:31). Berkaitan dengan teori Etzioni dan Cohen, Daniel Bell juga menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari tiga dimensi yang saling berintegrasi yakni dimensi politik, ekonomi dan budaya. Dalam dimensi politik, faktor penting adalah legitimasi yang merupakan hasil dari representasi dan partisipasi masyarakat. Dalam faktor ekonomi prinsip efisiensi merupakan hal kunci, sedangkan dalam dimensi budaya peran toleransi terhadap realisasi diri masyarakat melalui simbol ekspresifnya merupakan hal utama (1978:10-12).

Pola integrasi komunitas yang kompleks dapat dipahami jika kita melihat integrasi antar dua individu (*dyadic*). Dalam integrasi dyadic dapat terjadi “kawin-paksa” (subjek-objek), “kawin-kontrak” (subjek-subjek tanpa emosi, hanya pertukaran kepentingan), dan “kawin karena kesepakatan atau cinta” (subjek-subjek dengan emosi atau cinta). Pola kawin paksa menyerupai pola koersif; kawin kontrak serupa dengan pola utilitarian sedangkan “kawin karena cinta” merupakan pola normatif karena yang berperan adalah emosi. Pola serupa terjadi pada tingkat *nasional* di mana dapat terjadi integrasi karena faktor koersif (seperti monopoli pemerintah atas angkatan bersenjata) atau ketergantungan fungsional antar kelompok atau daerah. Sedangkan integrasi normatif bersifat emosional (nasionalisme) dan terjadi karena sejarah, pengalaman dan tekad bersama serta harapan masa depan di mana kelompok-kelompok yang ada ingin bersatu walaupun terdapat perbedaan-perbedaan. Setiap integrasi mencakup ketiga mekanisme tersebut semakin tinggi kadar mekanisme tersebut dan fungsional semakin mantap pula integrasi tersebut. Sebaliknya, tiadanya ketiga faktor tersebut akan menghasilkan disintegrasi (perceraian).

Jika dikaitkan dengan faktor "inertia" dari Cohen dapat dianalogikan bahwa semakin lama suatu integrasi atau perkawinan, maka akan menghasilkan kekuatan yang menyebabkan disintegrasi (perceraian). Dalam tingkat *nation-state* terlihat bahwa negara bangsa yang berusia di atas 100 tahun yang mengalami disintegrasi hanyalah satu yakni Irlandia dari Inggris pada 1921 (berdasarkan Atlas Norodov Mira). Demikian pula dalam tingkat perkawinan, perceraian (bukan karena kematian) pada usia awal dan akhir relatif sedikit.

### **Malintegrasi di Timika**

Pembahasan mengenai integrasi akan kita gunakan untuk menganalisis integrasi pada tingkat komunitas di Freeport yang melibatkan penduduk lokal, perusahaan Freeport dan pemerintah (pusat dan lokal). Konflik tetap saja terjadi di Timika (dan Tembagapura) walaupun pihak Freeport Indonesia Company (Freeport McMoRan (82%), Pemerintah RI (9%), dan Indocopper Investama (9%) telah mempekerjakan penduduk lokal, membeli produk lokal, membangun fasilitas sosial-ekonomi dan membayar pajak pada pemerintah RI. Proses integrasi di Timika (dan Irian Jaya) perlu mendapat perhatian khusus karena secara historis, sosial dan kultural komunitas lokal tersebut mempunyai karakter berbeda. Namun, kebijakan dan keadaan di Timika saat ini dapat dikatakan dalam keadaan "malintegrasi" di mana terjadi ikatan atau simpul integrasi yang lemah dalam dimensi ekonomi, sosial, budaya dan politik seperti yang terlihat dalam bahasan berikut.

### **Simpul Ekonomi**

Integrasi ekonomi dapat terjadi melalui turut sertanya komunitas lokal dalam kepemilikan alat produksi atau sumber daya alam dan jaringan pemasok atau pemasaran. Kehadiran Freeport telah melibatkan penduduk lokal sebagai pemasok kebutuhan sehari-hari di mana sekitar Rp. 600 juta dibelanjakan oleh Freeport setiap bulan. Di samping itu Freeport sampai pada 1995 telah menyumbang US\$ 120 juta (*Forum Keadilan*, 16 November 1998). Namun, penduduk tidak mendapat kompensasi hak layak dan tidak memiliki saham sama sekali. Pemberian saham perusahaan pada komunitas lokal (dan koperasi pekerja) sesuai dengan "himbauan tapos". *Corporate-reform* ini berdampak seperti *land-reform* karena mengubah polarisasi dan kontradiksi antara "pemilik" dengan "bukan pemilik" menjadi satu kelompok yaitu "pemilik" (walaupun ada yang banyak dan sedikit), sehingga dapat mengurangi potensi konflik. Sebenarnya dalam negosiasi perpanjangan konsesi Freeport atau KK II (dari 10.000 ha menjadi 2,6 juta ha) pada 1991 terdapat kesempatan untuk memberi saham bagi komunitas lokal. Yang terjadi adalah penjualan saham pada swasta (Bakrie Copperindo Investama Corporation) yang kemudian dijual kembali pada swasta (Yayasan Nusamba) dan Freeport McMoRan (*Gatra*, 24 Oktober 1998:29-30). Alternatif masa depan adalah komunitas lokal diberi sebagian saham pemerintah pusat atau dibelikan saham dengan dibiayai dari pajak, dividen dan royalti yang dibayar Freeport.

Pada awalnya penduduk di sekitar daerah Freeport memang jumlahnya sedikit, namun semakin lama semakin banyak yang berdatangan. Penduduk mempunyai logika bahwa mereka yang lebih dekat ke Freeport merasa lebih berhak atas hasil Freeport tersebut dibandingkan dengan pendatang. Seperti dalam masalah HPH, penduduk menganggap definisi tradisional (adat) mereka mengenai kepemilikan dan penguasaan sumber daya alam lebih absah dari definisi kepemilikan modern-legal yang datang belakangan dan digunakan oleh Freeport dan Pemerintah RI. Di samping itu perlu peninjauan oleh pemerintah pusat apakah hasil yang diterima dari Freeport telah cukup banyak yang dikembalikan kepada komunitas lokal. Data menunjukkan bahwa dalam periode 1988-1993 hanya Rp. 20 miliar pajak Freeport yang menetes kembali ke (seluruh) Irian (*Gatra*, 24 Oktober, 1998:28). Sedangkan pajak, dividen dan royalti dari Freeport pada periode 1989-1995 berjumlah US\$ 976,2 juta atau Rp. 2 triliun.

### **Simpul Sosial**

Dari segi sosial, integrasi antara komunitas lokal dengan pendatang dapat terjadi melalui berbagai keanggotaan dalam kelompok-kelompok di tempat kerja, keluarga, organisasi sosial dan tempat tinggal. Saat ini terlihat bahwa dari 15.000 pekerja hanya 2.000 yang berasal dari Irian dan itupun pada pekerjaan lapisan bawah. Inklusi warga sebagai pegawai pada lapisan tengah dan atas tidak mudah karena memakan waktu. Namun, hal ini dapat ditingkatkan dengan memberi *quota* agar penduduk lokal dapat menjadi *supervisor* dan *manager*.

Simpul sosial yang integratif dapat diperkuat pula dengan adanya kawin campur dan wadah organisasi (misalnya, olahraga atau agama) yang meningkatkan interaksi dan solidaritas antara komunitas lokal dan

pendatang. Sepertinya jumlah organisasi dan persentase kawin campur saat ini masih sangat sedikit, sehingga simpul integrasi sosial masih lemah. Demikian pula pemukiman Freeport yang eksklusif tidak menghasilkan interaksi dan solidaritas dengan komunitas lokal.

### **Simpul Budaya**

Homogenitas atau kesamaan agama, adat, bahasa, dan suku-bangsa dapat mempermudah integrasi, namun kasus Freeport menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan antara pendatang dengan komunitas lokal sangat dominan. Walaupun demikian, integrasi tetap dapat terjadi jika kedua pihak saling toleran dan menghormati simbol budaya (terutama yang sakral) masing-masing. Dalam hal ini ternyata kehadiran Freeport lebih bersifat disfungsional karena mengambil alih puncak Ertsberg yang ditempati roh Yel Tegel yang mengajari penduduk berladang. Keadaan ini memutuskan simpul sakral dan mengibarkan disintegrasi spiritual. Demikian pula pencemaran lingkungan, khususnya sungai yang dianggap sakral, didefinisikan penduduk lokal sebagai pelanggaran budaya (lihat pula Tom Beanal, 1997).

Integrasi budaya dapat juga terjadi dengan penggunaan simbol budaya (arsitektur, seni) lokal dalam perkantoran dan perumahan pendatang. Keadaan ini membuat keberadaan pendatang sebagai pihak asing (tamu) dapat lebih diterima karena dianggap menesuaiakan diri (“mengalah”) dengan (simbol) budaya komunitas lokal (tuan rumah) yang telah hadir lebih dulu.

### **Simpul Politik**

Lemahnya simpul integrasi ekonomi, sosial dan budaya tidak pula diperkuat dengan simpul integrasi politik. Simpul politik secara horizontal dapat terjadi melalui partai-partai politik dan secara vertikal terbentuk jika aspirasi dari bawah (massa) diwujudkan dalam keputusan politik oleh elite politik (Pemerintah Daerah dan DPR/DPRD). Partai-partai politik sulit untuk berfungsi dalam integrasi horizontal antara komunitas lokal dengan Freeport yang merupakan perusahaan vital-multinasional dan eksklusif. Demikian pula, integrasi vertikal antara Pemerintah Daerah/DPRD dengan pendatang maupun dengan komunitas lokal masih lemah. Dalam hal ini para wakil rakyat daerah pemilihan Irja-DPR (9 wakil), DPRD I (36 wakil) dan DPRD II/Fal Fak (16 wakil)- perlu lebih sering turun ke lapangan dan memberikan proteksi pada komunitas lokal. Akhirnya simpul integrasi politik lebih didominasi dengan paksaan militer dan polisi, sehingga terjadilah kestabilan semu yang seringkali menghasilkan protes dan kerusuhan.

Kasus malintegrasi di Timika pada akhirnya akan mengarah pada disintegrasi atau reintegrasi. Pada tingkat komunitas dapat saja terjadi integrasi fungsional antara dua pihak yang berbeda sejarah dan ciri sosial-budayanya jika di antara mereka terdapat ketergantungan yang saling menguntungkan. Simpul-simpul integrasi di Tembagapura-Timika menunjukkan bahwa kadar paksaan atau koersif (stabilitas melalui aparat keamanan) masih kuat sedangkan saling-ketergantungan ekonomi masih lemah karena tiadanya saham lokal, sedikitnya royalti (langsung maupun melalui pemerintah) dan kurangnya kesempatan kerja (lapisan tengah dan atas).

Demikian pula kesempatan untuk membuat sejarah integrasi yang positif dari 1967 sampai 1996 dan mengembangkan emosi kebersamaan serta solidaritas komunitas telah terlewatkan. Integrasi yang terjadi sekarang adalah semu atau malintegrasi di mana keadaan sebenarnya masyarakat adalah resah dan konflikual. Kontrol oleh aparat keamanan hanya bersifat temporer dan tidak akan mengurangi “iri dan benci sosial”, bahkan cenderung meningkatkan sikap tersebut.

### **Reintegrasi**

Dalam perkembangannya reintegrasi di Timika sebagai upaya mengatasi malintegrasi lebih bersifat pada aspek koersif, utamanya dalam penguatan militer. Selain itu telah diupayakan pula upaya dalam program ekonomi (utilitarian) agar komunitas disekitarnya mengalami perbaikan ekonomi serta menjadi lebih terintegrasi. Namun, dalam aspek budaya relatif tidak terdapat tindakan yang dapat meningkatkan rasa integrasi tersebut.

Penguatan militer sebagai sarana integrasi koersif ditandai dengan Peningkatan Koramil menjadi Kodim dan Polsek menjadi Polres. Selain itu terdapat penempatan satuan tugas sebanyak 800 tentara enam

kendaraan lapis baja yang pembiayaannya dibantu oleh Freeport sebanyak 35 juta dolar (*Far Eastern Economic Review*, Desember 4, 1997: 22).

Dalam bidang ekonomi, malintegrasi diupayakan untuk dikurangi dengan keputusan Freeport yang akan memberi royalti 1% dari pendapatan kotornya, memperhatikan lingkungan, menambah beasiswa dari 100 menjadi 200 per tahun serta melipat-duakan supervisor dan pegawai asal Irian (*The Jakarta Post*, April 14, 1996). Bantuan 1% (15 juta dolar) terhenti setelah tahun pertama karena kekacauan dalam pendistribusiannya oleh Pemerintah Daerah serta konflik yang terjadi di antara suku-suku yang terlibat (*Far Eastern Economic Review*, Desember 4, 1997: 23). Namun, sumber-sumber malintegrasi ekonomi lainnya seperti tiadanya kompensasi hak ulayat dan pemilikan saham lokal, rendahnya tetesan hasil Freeport dari pusat serta partisipasi warga dalam pengambilan keputusan masih belum mengalami perbaikan yang signifikan.

Sementara itu malintegrasi dalam budaya masih belum terpecahkan. Sebagai contoh akses ke puncak Ertsberg yang dianggap sakral belum diperbolehkan. Upaya memberi kesempatan terbatas pada waktu tertentu pada warga untuk mengunjungi puncak tersebut dapat mengurangi keterasingan dan keresahan budaya. Upaya lain, jika memang hal ini dimungkinkan secara adat, adalah pemindahan kesakralan puncak Ertsberg ke tempat lain yang lebih mudah untuk dikunjungi. Secara singkat dalam masalah budaya perlu diadakan upaya pengganti, sehingga tidak menghilangkan atau mengurangi makna budaya dan keagamaan dari suku-suku di sekitar Timika.

### **Prospek Integrasi**

Masalah Tembagapura bukanlah masalah bipartit antara komunitas lokal dan Freeport, namun bersifat tripartit antara komunitas, Freeport dan pemerintah. Pembangunan fasilitas sosial-ekonomi oleh Freeport lebih merupakan *development in the community*. Namun, untuk *development in the community* yang berkaitan dengan integrasi dan transformasi sosial merupakan hak masyarakat dengan dukungan Eksekutif (Pemerintah Pusat dan Daerah) dan Legislatif (DPR dan DPRD). Jelaslah bahwa komitmen kedua lembaga tersebut pada komunitas lokal perlu lebih ditingkatkan. Demikian pula dukungan aktif pers, LSM dan perguruan tinggi perlu lebih diintensifkan dalam upaya reformasi ini.

Jika kebijakan reformasi yang komprehensif (memperlakukan komunitas sekitar Freeport sebagai subjek yang dihormati harkat dan martabatnya serta mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi) tidak segera dilakukan, maka akan terjadi akumulasi keresahan. Apalagi generasi muda yang semakin terdidik dan kritis terus bertambah. Keadaan yang akan terjadi adalah segmentasi dan dikotomi antara komunitas lokal dengan pendatang yang mengarah pada polarisasi dan kontradiksi. Ditambah dengan kelompok penggerak (misalnya, GPK) dan peristiwa pemicu (seperti "berita tertabraknya warga oleh mobil Freeport") konflik mudah meledak. Dengan demikian rentetan konflik sejak hadirnya Freeport (1970-an) akan berlanjut terus dengan variasi sasaran dan tuntutan. Sasaran konflik dapat meluas dari Freeport pada pendatang (seperti kerusuhan di pasar Timika) dan pada Pemerintah RI (kerusuhan di kantor Kepolisian Timika). Demikian pula isi tuntutan dapat meningkat dari perbaikan sosial-ekonomi-budaya menjadi penutupan Freeport (disintegrasi komunitas), permintaan daerah otonomi, daerah khusus, bahkan tuntutan separatis dari Republik Indonesia (disintegrasi nasional). Disintegrasi nasional karena iri sosial-ekonomi ini terjadi pada 1989 di Panguna, Bougainville, PNG, di mana muncul gerakan separatis dengan nama Republik Solomon Utara. Separatisme ini merupakan protes atas ketidak-adilan oleh perusahaan tambaga Australia (Bougainville Copper Limited), pekerja pendatang dari New Britain Timur dan Pemerintah Pusat PNG (Port Moresby) (lihat pula :Hamid, 1996:114-118).

### **Daftar Pustaka**

Beanal, Tom, *Amungme:Magaboaar Negel Jobei-peibei* (Jakarta:Walhi,1997).

Bell, Daniel, *The Cultural Contradictions of Capitalism* (New York:Basic Books,1978).

Cohen, Percy S., *Modern Social Theory*. London: Heinemaan,1968.

Durkheim, Emile, *The Division of Labor in Society* (New York:Macmillan, 1933 (1893)).

Durkheim, Emile, *The Elementary Forms of Religious Life* (trans, Joseph W. Swain). (Glencoe, Illinois: The Free Press, 1948).

Etzioni, Amitai, *The Active Society: A Theory of Societal and Political Processes* (New York: The Free Press, 1968).

*Far Eastern Economic Review*, December 4, 1997.

*Forum Keadilan*, 16 November 1998.

*Gatra*, 24 Oktober 1998.

*The Jakarta Post*, April 14, 1996.

Hamid, H. Zulkifli, *Sistem Politik Pasifik Selatan* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1996).

Hobbes, Thomas, *Leviathan* [New York: Macmillan, 1947 (1651)].

Smith, Adam, *The Wealth of Nations* [New York: Modern Library, 1937 (1776)].

Parsons, Talcott, Robert F. Bales, and Edward Shils, *Working Papers in the Theory of Action* (Glencoe, III: Free Press, 1953).